

Politik

Sindir Hasyim Jadi
Komisaris BUMN,
Doli Kurnia Golkar:
Hadiah dari Siapa?
Halaman 2

Pemerintahan

Prabowo Pimpin Ratas Karhutla,
Instruksikan Pengerahan
Optimal Seluruh Sumber Daya
Halaman 4

HARIAN MERDEKA

SELASA, 13 OKTOBER 2026

ASPIRASI RAKYAT

Rp. 15.000 | TERBIT SORE



Skandal Rp11 M PUPR Lebak Mangkrak, Aktivis Desak Jaksa Agung Copot Kajari

JAKARTA | Harian Merdeka – Penanganan skandal dugaan korupsi bermodus kelebihan pembayaran senilai Rp11 miliar pada belasan proyek infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Lebak, Banten, dinilai berjalan di tempat dan terkesan "masuk angin". Kendati Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebak berjanji menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan/Penyidikan (Sprindik) sejak Mei 2026, hingga pertengahan Oktober 2026 tak satupun pejabat Pemkab maupun kontraktor yang ditetapkan sebagai tersangka.

Sidak Lapas di Sumsel, Ketua Komisi XIII DPR Minta Hentikan Fasilitas Mewah



PALEMBANG | **Harian Merdeka**

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya meminta seluruh kepala lembaga pemasyarakatan (kalapas) dan kepala rumah tahanan negara (karutan) di Sumatera Selatan membenahi tata kelola serta memastikan tidak ada diskriminasi dalam pemenuhan hak warga binaan. Ia menyoroti dugaan perlakuan istimewa terhadap warga binaan tertentu, peredaran narkoba, penggunaan telepon genggam ilegal, hingga potensi penyimpangan dalam pengelolaan bahan makanan.

Penegasan tersebut disampaikan Willy saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (9/10/2026). Kunjungan itu menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap penyelenggaraan layanan pemasyarakatan, termasuk pemenuhan hak dan kebutuhan dasar warga binaan.

Menurut Willy, kualitas pengelolaan lapas dan rutan mencerminkan tata kelola negara. Karena itu, ia mengingatkan jajaran pemasyarakatan agar tidak membiarkan penyalahgunaan kewenangan ataupun perlakuan berbeda berdasarkan latar belakang ekonomi dan status sosial warga binaan.

"Kalau kau ingin melihat sebuah negara, lihat bagaimana mereka mengelola penjara," ujar Willy di hadapan jajaran pemasyarakatan Sumatera Selatan.

Legislator Fraksi Partai NasDem tersebut menegaskan, warga binaan yang memiliki kemampuan ekonomi tidak boleh memperoleh fasilitas istimewa, sementara hak warga binaan lainnya justru terabaikan. Ia meminta kalapas dan karutan menjalankan tugas secara adil serta tidak menyalahgunakan kewenangan. ● (Egi)

Sindir Hasyim Jadi Komisaris BUMN, Doli Kurnia Golkar: Hadiah dari Siapa?



JAKARTA |
Harian Merdeka

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tanjung soroti jabatan eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari sebagai Komisaris PTPN I di tengah polemik ijazah Wapres RI Gibran Rakabuming Raka pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal itu disampaikan Doli ke awak media di tengah dugaan 'pasal selundupan' dalam Peraturan KPU (KPU) yang diduga mempermudah langkah Gibran jadi calon wakil presiden (Cawapres) pada Pilpres 2024.

Doli mempertanyakan posisi Hasyim sebagai Komisaris Independen di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I. Padahal, menurut Doli, Hasyim tak memiliki latar belakang di bidang perke-

bunan.

"Setahu saya beliau tidak punya latar belakang yang berkaitan dengan soal komisaris BUMN, khususnya berkaitan dengan soal perkebunan, dia harus jelaskan itu." Kata Doli di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (12/10).

Sindiran itu dilayangkan Doli merespons kritik Hasyim soal dugaan penyelundupan Pasal 18 Ayat 3 Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal itu belakangan menuai sorotan dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK) dan dianggap sengaja disiapkan untuk meloloskan syarat pencalonan Gibran sebagai cawapres.

Sebagai mantan Ketua KPU yang ikut merumuskan PKPU tersebut, Hasyim membantah pihaknya telah secara diam-

diam memasukkan Pasal 18 ayat 3 PKPU. Dia pun meminta agar semua pihak tak bersikap munafik.

"Karena itu pada kesempatan ini saya ingin menyerukan kepada semua pihak, lupa boleh, munafik jangan," ujar Hasyim.

Doli mengungkapkan kegeramannya atas pernyataan Hasyim karena dinilai terlalu personal. Dia pun menduga jabatan komisaris yang diemban sebagai Hasyim saat ini adalah hadiah.

"Saya tanya dia sekarang posisinya sebagai komisaris di salah satu BUMN, ya. Coba tanya sama dia itu dia tuh dapat dari mana? Komisaris itu, hadiah dari siapa?" kata Doli.

Hingga berita ini ditulis, Redaksi belum mendapatkan pernyataan resmi dari Hasyim maupun PTPN dan Kementerian BUMN soal jabatan komisaris yang disinggung Doli. ● (Egi)

Redaksi **MERDEKA**

Diterbitkan Oleh : PT.JAKARTA RAYA PERS

Pemimpin Umum : Helmy Halim, Pemimpin Perusahaan : Alan Oskar, Wakil Pemimpin Perusahaan : Verencia Mercy, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Helmy Halim, Wakil Pemimpin Redaksi : Abdul Rohman, Redaktur Eksekutif : Egi Hendrawan, Redaktur Pelaksana : Agus Irawan, Redaktur : Andri Achdiat, Budi Santoso, Taufik, Saepudin, Adam Kamal, Reporter : Aceng Abidin, Ahmad Baladi, Sahrul, Robi Liu, Prayitno, Edi.ST, Nurziman, Rafiudin, Abdul Aziz, Siti Marko, RA. Sudrajat, Syarif Hidayat, Irwani Heliawan, Abidin, Hasuri, Mukhtar, Jan Zarian, Juli Rabiati, H.Mulyadi, Didit, Daenk, Ali.R., Kabiyo Medan : Umar, S.Pd.I Perwakilan Nias (Sumut) Adi Laoli, Sekretaris Redaksi : Syafina Azzahra, Keuangan : Yosefin Arwinda Devi, Manager Iklan : Muksin, P.Adi, Iklan : S Fajar, Wilki Irawan, Pemasaran : Hendro, Anwar, Saunan, Agus Black, Dian, Layout : Bobby Saputra, Fuad, IT Web : Walid, Amel, Bagian Umum/OB : Wawan, Penasehat Hukum : Hanafi Tanawijaya, SH, Dedi Suryadi. SH

Kantor Usaha/Redaksi : Rukan Golden Fatmawati, Jl.RS Fatmawati G-34 No.15 RT.008 RW.006, Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. NO. REK. BANK MANDIRI KCP JAKARTA KEMENDIKBUD 1220011807917 a/n JAKARTA RAYA PERS.Telp:081212262686

Kantor Perwakilan : Ruko ModernLand Blok R 30, Jalan Hartono Raya Kelurahan Kelapa Indah Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Telepon : (021) 59728637. (isi di luar tanggungjawab percetakan)

Anggota DPR Desak Pemerintah Evaluasi Izin Sawit dan Tambang

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menegaskan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang setiap musim kemarau tidak boleh dianggap sebagai fenomena tahunan semata.

Menurut Firman, persoalan tersebut harus ditangani secara serius melalui evaluasi tata kelola hutan, penegakan hukum, serta pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Politisi Partai Golkar ini menilai, persoalan kehutanan memiliki keterkaitan erat dengan masa depan masyarakat.

Karena itu, lanjut Firman, pembahasan politik dan strategi pemenangan pemilu semestinya tidak hanya berorientasi pada perolehan kursi, tetapi juga menyentuh persoalan mendasar yang dihadapi rakyat.

“Golkar tidak boleh hanya bicara politik. Golkar harus bicara soal kehidupan rakyat. Dan salah satu persoalan kehidupan rakyat yang paling mendasar hari ini adalah persoalan hutan,” ujar Firman dalam keterangan pers, Senin (12/10/2026).

Firman mengaku prihatin terhadap pengelolaan hutan yang dinilai masih terlalu berorientasi pada nilai ekonomi.

Menurut Firman, hutan kerap dipandang sebatas sumber komoditas, mulai dari kayu, kelapa sawit, batu bara, nikel, emas, hingga berbagai mineral lainnya.

Padahal, lanjut Firman, hutan memiliki fungsi yang jauh lebih luas daripada sekadar menghasilkan keuntungan ekonomi.

“Hutan merupakan aset penting bangsa yang berperan menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus menopang kehidupan



masyarakat. Nilai ekonominya dilihat hanya dari kayu, dari sawit, dari batu bara, dari nikel, emas dan mineral lainnya. Semangatnya hanya memanfaatkan, mengeksploitasi. Padahal hutan itu adalah aset terbesar negara, paru-paru dunia yang berkelanjutan, sumber kehidupan,” papar Anggota Baleg DPR RI ini.

Firman menyoroti pola bencana yang terus berulang di Indonesia. Ketika musim kemarau tiba, lanjut Firman, karhutla kembali terjadi dan menimbulkan dampak terhadap kehidupan masyarakat. Asap kebakaran dapat mengganggu kesehatan, aktivitas pendidikan, hingga transportasi udara.

“Sementara itu, ketika musim

hujan datang, kerusakan lingkungan dan persoalan tata kelola kawasan hutan dapat meningkatkan risiko banjir bandang serta tanah longsor di sejumlah wilayah,” sesal Firman.

Menurut Firman, kondisi tersebut menunjukkan perlunya penanganan yang tidak hanya berfokus pada dampak bencana, tetapi juga menasar penyebab utama kerusakan lingkungan.

“Negara harus hadir secara sungguh-sungguh. Tidak bisa hanya reaktif memadamkan api saat karhutla terjadi. Tidak bisa hanya reaktif mengirim bantuan saat banjir dan longsor terjadi,” tegas Wakil Ketua Fraksi Golkar di MPR RI ini.

● (Egi)

Tutup Celah Karhutla, Menteri LH Ajukan Revisi Aturan Pembakaran Lahan ke DPR



JAKARTA | **Harian Merdeka**

Menteri Lingkungan Hidup (LH) Juhar Hidayat mengatakan akan mengajukan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) ke DPR. Juhar meminta pasal terkait pembukaan lahan dengan cara dibakar oleh masyarakat lokal diadakan.

Hal itu dikatakan Juhar dalam konferensi pers persiapan delegasi RI pada COP-31

UNFCCC, di wilayah Jakarta, Senin (12/10/2026). Juhar mengatakan pihaknya juga bersedia mencari solusi untuk masyarakat lokal tersebut.

“Jadi pemerintah melalui KLH itu sedang membuat inisiatif untuk merevisi Undang-Undang 32/2009 mengenai pasal itu, pasal yang membolehkan local wisdom masyarakat itu boleh membakar sampai 2 hektare,” ujar Juhar.

“Kita sudah sepakat mengajukan revisi kepada DPR, jadi

betul-betul pasal itu ditutup. Jadi sekaligus kita mencari jalan keluar bagi masyarakat yang perlu dana untuk membuka lahan, yang open akses bukan konsesi,” tambahnya.

Juhar menyebut hal ini berkaitan dengan pembiayaan iklim. Sebab, pembakaran lahan, katanya, bisa meningkatkan emisi.

“Ini bisa juga dibicarakan dengan pendanaan iklim, karena ketika dia bakar ini jujur aja nanti terganggu lagi emisi kita karena asap ini luar biasa emisinya, jadi naik lagi,” katanya.

Kemudian, Juhar berbicara soal solusi untuk sebagian wilayah bisa difasilitasi pemerintah untuk pembukaan lahan dengan cara tertentu.

“Katakanlah orang masyarakat lokal, ‘wah mahal’, berapa sih mahalnya, tidak semua kan, hanya beberapa daerah, Sumatera Selatan, Kalimantan dan beberapa provinsi, jadi kira-kira itu nanti bisa hanya berapa

hektare tidak sampai ribuan hektare, dan nanti barangkali berpotensi beberapa banyak co2 kalau dia bakar,” katanya.

Di kesempatan yang sama, Utusan Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo mendukung rencana tersebut. Dia mengatakan bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang sekarang banyak terjadi dipicu oleh adanya peraturan yang menjadi celah tersebut.

“Ternyata masih ada celah dalam hukum kita memberikan wewenang kepada kepala daerah untuk mengizinkan pembakaran hutan untuk penanaman, masyarakat adat,” kata Hashim.

Hashim mengatakan pemerintah ingin menutup celah untuk pembakar lahan.

“Itu membuka celah untuk pembakaran liar, dan saya dengar banyak kebakaran di Sumatera dan Kalimantan akibat itu, dan ini yang mau ditutup celah seperti itu,” tambahnya. ● (Egi)

Alarm Bahaya! Damkar Tangel Temukan Gedung Belum Lengkap Proteksi Kebakaran



TANGERANG SEATAN | **Harian Merdeka**

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) sedang mengkaji untuk mengusulkan adanya ketentuan sanksi Pidana terhadap gedung yang tidak dilengkapi dengan alat proteksi kebakaran.

Kepala Bidang Pencegahan Damkar Tangsel, Muksin Al-Fachri mengatakan, selama tahun 2026 ini, pihaknya sudah melakukan inspeksi terhadap 338 gedung.

Dari ratusan gedung itu, beberapa diantaranya tidak dilengkapi alat proteksi kebakaran.

“338 gedung yang sudah kita periksa tahun ini, jumlahnya masih bisa bertambah. Yang belum lengkap kita arahkan (untuk melengkapi alat proteksi kebakaran, red),” kata Muksin ketika ditemui di DPRD Tangsel, Senin, 12 Oktober 2026.

Muksin menerangkan, padahal alat proteksi kebakaran merupakan instrumen penting dalam mencegah terjadinya kebakaran.

Oleh karena itu menurutnya diperlukan regulasi yang mewajibkan seluruh gedung dan bangunan memiliki alat proteksi, serta adanya sanksi yang bisa diberikan terhadap pemilik gedung yang melanggar ketentuan tersebut.

“Saat ini kan memang di Perda kita belum ada sanksi. Jadi mereka kalau tidak memiliki alat proteksi sifatnya kita masih himbauan, tidak ada sanksi,” ungkapnya.

“Tapi ke depan kalau ini nanti disetujui, kita akan memuat pasal sanksi. Sanksi administratif tentunya yang kita utamakan, mungkin juga sanksi pidana,” lanjutnya.

Ia menyebut, pemberian sanksi terhadap pemilik gedung yang tidak melengkapi alat proteksi kebakaran bukan hal baru. Sejauh ini beberapa daerah telah hal tersebut, seperti halnya Jakarta dan Depok.

Muksin sendiri mengaku sudah berkonsultasi dengan Kementerian Hukum mengenai kemungkinan adanya pasal pidana dalam Peraturan Daerah.

“Saya tanyakan bahwa dengan KUHP yang baru apakah di dalam membuat Perda ini Pemda masih dibolehkan untuk memberikan pasal terkait pasal sanksi? Sanksi administratif maupun sanksi pidana, dan itu boleh,” pungkasnya. ● (Agus)

Prabowo Pimpin Ratas Karhutla, Instruksikan Pengerahan Optimal Seluruh Sumber Daya



JAKARTA |
Harian Merdeka

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara hybrid dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 12 Oktober 2026. Turut hadir Gubernur Sumatra Selatan dan Kalimantan Tengah serta Pangdam & Kapolda kedua provinsi tersebut.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya mengatakan bahwa dalam rapat terse-

but, dilaporkan sejumlah perkembangan dan langkah penanganan karhutla. Seskab Teddy mengatakan berdasarkan laporan Kepala BNPB, di 6 provinsi paling terdampak karhutla masih terdapat sekitar 639 hektare lahan yang dalam proses pemadaman.

“Saat ini fokus utama tertuju pada 2 provinsi yaitu Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan,” ujar Seskab Teddy.

Selain itu, Seskab Teddy menyebut operasi darat juga didukung lebih dari 60.177 personel gabungan, dengan tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata di atas 80 persen dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya. Selain operasi darat, Seskab Teddy juga mengatakan bahwa operasi udara juga dilakukan dalam mempercepat pemadaman api.

“Operasi udara melalui water bombing di sejumlah wilayah juga terus dilakukan untuk mempercepat pemadaman,” imbuh Seskab Teddy.

Lebih lanjut, Seskab Teddy menyebut kondisi saat ini di Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) terus dioptimalkan untuk memanfaatkan pertumbuhan awan hujan, seiring perkiraan awal musim hujan yang mulai merata pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026.

“Presiden meminta agar upaya penanganan karhutla terus diperkuat dan seluruh sumber daya dikerahkan secara optimal untuk mempercepat pemadaman serta mencegah meluasnya kebakaran,” pungkas Seskab Teddy. ● (Egi)

“Saat ini fokus utama tertuju pada 2 provinsi yaitu Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan,”

Teddy Indra Wijaya
Sekretaris Kabinet (Seskab)

KPK Telusuri Dugaan Dana Non-Budgeter Rp200 Miliar dalam Kasus Iklan Bank BJB



JAKARTA |
Harian Merdeka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan penyimpangan dalam pengadaan jasa agensi iklan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb) periode 2021–2023. Penyidik kini menelusuri mekanisme pengadaan hingga dugaan penggunaan sekitar 50 persen dari total anggaran Rp400 miliar untuk memenuhi kebutuhan dana non-budgeter.

Pendalaman tersebut dilakukan saat penyidik memeriksa Khandinar Sidiq (KDS), Officer PPA Divisi Umum bank bjb, sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (12/10/2026).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemeriksaan tersebut difokuskan pada standar operasional prosedur (SOP) dan mekanisme pen-

gadaan barang dan jasa di lingkungan bank bjb.

“Dalam pemeriksaan saksi KDS, didalami perihal SOP dan mekanisme pengadaan barang dan jasa di lingkungan Bank BJB,” kata Budi kepada wartawan, Selasa (13/10/2026).

KPK kini berupaya mengungkap ke mana dana tersebut mengalir, siapa saja pihak yang diduga menerima, serta untuk kepentingan apa uang itu digunakan.

“Dari dana non-budgeter itulah penyidik fokus melakukan penelusuran berkaitan dengan aliran uang. Jadi uang-uang dana non-budgeter ini peruntukannya untuk siapa dan untuk apa,” jelasnya.

Penelusuran aliran dana menjadi bagian penting dalam pengembangan perkara ini. Penyidik tidak hanya mendalami proses administrasi dan mekanisme pengadaan, tetapi juga berupaya mengungkap hubungan antara

nilai kontrak, realisasi jasa iklan, dan dugaan penggunaan dana di luar kebutuhan proyek.

Mantan Direktur Keuangan Dijadwalkan Diperiksa

Selain Khandinar Sidiq, KPK sebelumnya menjadwalkan pemeriksaan terhadap Nia Kania (NK), mantan Direktur Keuangan bank bjb periode 2021–2023.

Namun, Nia tidak memenuhi panggilan pemeriksaan pada Senin (12/10/2026). KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan pada Kamis (15/10/2026).

Keterangan Nia dinilai relevan untuk didalami dalam rangkaian penyidikan, terutama terkait mekanisme keuangan dan proses pengadaan pada periode yang sedang di-usut. Meski demikian, materi pemeriksaan terhadap setiap saksi tetap menjadi kewenangan penyidik.

● (Agus)



KLH Seret Bos Limbah Pasar Kemis ke Pengadilan, Dituntut Rp3,1 Miliar

TANGERANG | **Harian Merdeka**

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) RI menyeret PT Bilal Jaya Properti (BJP), perusahaan pengolahan limbah dan produsen batako yang berlokasi di Kampung Bugel, Desa Pangadegan, Kecamatan Pasar Kemis ke Pengadilan Negeri Tangerang.

Dalam tuntutanannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang menuntut Bos limbah berinisial EN, dengan pidana denda sebesar Rp3,1 miliar atas perkara dugaan pencemaran lingkungan.

“Saat ini perkara tersebut sudah masuk tahap akhir, pertengahan Oktober 2026 sudah masuk agenda pembacaan putusan,” ujar Kepala Seksi Bina Hukum DLHK Kabupaten Tangerang, Sandi Nugraha dikutip dari Kabar6, Senin (12/09/2026).

Menurut Sandi, atas perbuatannya EN didakwa dengan Pasal berlapis, antara lain Pasal 98 Ayat (1), jo Pasal 116 Ayat (1) huruf a, dan Pasal 119 huruf c UU 32/2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tak hanya terjerat pidana denda, kata dia, Tim JPU juga telah mengajukan tuntutan hukum berupa pembubaran korporasi terhadap perusahaan milik MN, salah tokoh yang disegani di wilayah Kabupaten Tangerang tersebut. Diungkapkan Sandi, sanksi tegas KLH RI tersebut merupakan tindakan tegas bagi perusahaan agar memperbaiki tata kelola pengolahan limbah sesuai aturan hukum yang berlaku.

“Kami berharap Majelis Hakim menjatuhkan putusan seadil-adilnya,” tandasnya.

● (Egi)

Ditresnarkoba Polda Banten Bongkar Jaringan Narkoba Ekspedisi, 11 Kg Ganja Disita



SERANG | **Harian Merdeka**

Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Banten menggagalkan pengiriman ganja seberat 11 kilogram melalui jasa ekspedisi kargo. Dua pria berinisial AS dan MF diamankan dalam kasus tersebut.

Dirresnarkoba Polda Banten Kombes Wiwin Setiawan menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan pengiriman narkotika melalui jasa ekspedisi. Pada Rabu (7/10/2026) sekitar pukul 10.00 WIB, petugas mendatangi gudang J&T Cargo di Jalan Raya Perancis Nomor 32, Jatimulya, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten.

“Dari hasil pemeriksaan terhadap paket yang dicurigai, petugas menemukan 10 paket berisi bahan atau daun yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto keseluruhan sekitar 11.088 gram,” kata Wiwin, Senin (12/10/2026).

Selanjutnya, petugas melakukan teknik control delivery dengan berkoordinasi bersama pihak ekspedisi untuk mengawasi proses pengiriman hingga paket tiba di gudang J&T Cargo di wilayah Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Pada Kamis (8/10/2026) sekitar pukul 12.30 WIB, dua orang berinisial AS dan MF datang untuk mengambil paket tersebut. Petugas kemudian mengamankan keduanya dan melakukan pengeledahan.

“Usai berkoordinasi dengan pihak ekspedisi untuk mengawasi pengiriman paket, petugas berhasil mengamankan dua orang yang diduga terlibat,” kata Wiwin.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, paket tersebut diduga milik seseorang berinisial PD yang saat ini masuk daftar pencarian orang (DPO). Kedua tersangka kemudian dibawa ke Ditresnarkoba Polda Banten untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Saat dalam perjalanan menuju Polda Banten, petugas kembali melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap kedua tersangka. Dari pemeriksaan tersebut, petugas menemukan tas selempang milik AS yang berisi lima paket plastik klip ukuran sedang dan empat paket plastik klip ukuran kecil. Seluruh paket berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan sekitar 4,56 gram. ● (Egi)

Polda Metro Jaya Kembali Gerebek Kampung Boncos, Lapak Narkoba Dibakar



JAKARTA |
Harian Merdeka

Aparat gabungan kembali menggerebek Kampung Boncos, Palmerah, Jakarta Barat, Senin (12/10/2026) sore. Petugas membakar bangunan semipermanen yang dijadikan lapak narkoba dan mengamankan empat pria untuk diperiksa lebih lanjut. Empat pria tersebut masing-masing berinisial MI (20), R (32), SA (45), dan MR (34). Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Bismo Teguh Prakoso mengatakan penyidik akan mendalami asal-usul narkoba dan jaringan peredarannya.

“Dari hasil penyisiran yang terbagi dalam dua tim operasional, petugas berhasil mengamankan empat orang pria yang berada di lokasi penindakan.”

Kombes Bismo Teguh Prakoso
Direktur Reserse Narkoba
Polda Metro Jaya

“Dari hasil penyisiran yang terbagi dalam dua tim operasional, petugas berhasil mengamankan empat orang pria yang berada di lokasi penindakan,” kata Bismo dalam keterangannya, Senin. Penggerebekan berlangsung di kawasan Kota Bambu Selatan yang dikenal sebagai Kampung Boncos. Operasi tersebut melibatkan 116 personel dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, BNNP DKI Jakarta, TNI, dan Satpol PP.

Sebelum penyisiran, petugas menggelar apel gabungan yang dipimpin Kasubdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKBP Triyatno Pamungkas. Dalam arahannya, Triyatno menekankan kewaspadaan personel, penerapan sistem body system untuk menjaga keselamatan, serta kejelasan komando selama operasi. Di lokasi, petugas menemukan bangunan semipermanen yang digunakan sebagai lapak narkotika. Bangunan tersebut kemudian dimusnahkan

dengan cara dibakar.

Polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa 15 bong, 16 cangklong, satu timbangan elektrik, dua plastik klip kecil, 20 korek api, dua ponsel, serta selebaran identitas cetak nomor akun dompet digital atas nama Musyarrofah. Selain itu, petugas mengamankan tiga bilah pisau, dua gunting, dan satu cutter. Bismo menyebut penindakan tersebut sebagai bagian dari kegiatan rutin yang ditingkatkan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.

“Penindakan ini merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam upaya pencegahan peredaran narkotika dan pemulihan terhadap pengguna narkoba,” kata Bismo. Operasi berakhir sekitar pukul 17.00 WIB. Empat pria yang diamankan beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. ● (Egi)

Didampingi Direktur Resnarkoba, Kapolda Metro Jaya Sidak Kampung Narkoba Bahari Jakut



JAKARTA |
Harian Merdeka

Sehari melaksanakan tugasnya sebagai Kapolda Metro Jaya, Komjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto melakukan inspeksi mendadak, meninjau kawasan A5, Kampung Muara Bahari, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (12/10/2026).

Kunjungan Kapolda Metro Jaya tersebut dilakukan untuk memantau situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) sekaligus memastikan kondisi lingkungan tetap aman dan kondusif.

Kapolda Metro Jaya tiba di lokasi sekitar pukul 15.25 WIB didampingi sejumlah pejabat utama Polda Metro Jaya, Direktur Resnarkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol. Dr. Bismo Teguh Prakoso, Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol. Adhe Hariadi, serta Kapolsek Tanjung Priok Kopol R. Sigit Kumono beserta jajaran.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Brigjen Pol. Awang Joko selaku KBPNNP, Wakapolres Metro Jakarta Utara AKBP

Rohman Yongky Dilatha, serta Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Utara AKBP Ari Galang Saputro.

Dalam kunjungan tersebut, Kapolda Metro Jaya Dadang Hartanto bersama rombongan meninjau langsung kondisi lingkungan di kawasan A5 Kampung Muara Bahari.

Peninjauan kemudian dilanjutkan ke Posko A5 untuk melihat situasi wilayah dan kondisi keamanan di sekitarnya.

Pemantauan secara langsung ini menjadi bagian dari upaya Kepolisian untuk mengetahui perkembangan situasi di lapangan sekaligus memperkuat koordinasi antarsatuan dalam menjaga stabilitas keamanan.

Kapolda Metro Jaya menegaskan bahwa pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi juga membutuhkan peran serta masyarakat.

“Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tanggung jawab bersama. Kami ingin memastikan situasi di wilayah tetap aman dan

kondusif, sekaligus mendorong kehadiran Polri agar masyarakat merasa terlindungi dan nyaman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari,” ujarnya.

Selain memantau kondisi wilayah, Kepolisian juga menekankan pentingnya komunikasi dan kerja sama antara aparat dan masyarakat dalam mencegah potensi gangguan keamanan.

Warga diharapkan tidak ragu menyampaikan informasi kepada pihak kepolisian apabila menemukan hal-hal yang berpotensi mengganggu ketertiban lingkungan.

Melalui kegiatan tersebut, jajaran Polda Metro Jaya berupaya memperkuat koordinasi dan memastikan perkembangan situasi keamanan di Kampung Muara Bahari menjadi perhatian bersama.

Kepolisian juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian sosial, menjaga lingkungan, serta membangun kerja sama dengan aparat demi menciptakan suasana yang aman dan nyaman.

● (Egi)

Polisi Dalam Modus Bujuk Rayu Ritual Rukiah

Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di Pesantren Bekasi

BEKASI | **Harian Merdeka**

Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota mengalami modus bujuk rayu dengan dalih ritual rukiah dalam kasus dugaan kekerasan seksual terhadap sejumlah santriwati di sebuah pondok pesantren di wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat. Kasi Humas Polres Metro Bekasi Kota Suparyono mengatakan, terduga pelaku diduga menggunakan prosesi rukiah untuk melancarkan aksinya terhadap para korban.

“Modusnya bujuk rayu untuk rukiah,” kata Suparyono saat dikonfirmasi di Bekasi, Senin (12/10).

Berdasarkan data sementara yang dihimpun penyidik, seluruh korban yang terdapat dan telah melaporkan kejadian tersebut berjenis kelamin perempuan.

Polisi juga masih mendalami dugaan keterlibatan tiga orang lainnya berinisial HBH, F, dan S. Hingga kini, status hukum ketiganya belum ditetapkan karena penyidik masih melakukan penyelidikan lebih lanjut.

“Sementara masih didalami oleh penyidik dan masih dalam proses penyelidikan,” ujar Suparyono.

Penyidik terus mengumpulkan bukti dan meminta keterangan saksi untuk mengungkap perkara tersebut serta menentukan status hukum pihak-pihak yang diduga terlibat.

Sebelumnya, Satuan Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Pelayanan Perempuan dan Orang (PPO) Polres Metro Bekasi Kota menetapkan MHH (28), seorang guru di pondok pesantren tersebut, sebagai tersangka dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di wilayah Bekasi Selatan. ● (hmi)



MAIA 'PUSAT PERHATIAN'

JAKARTA |
Harian Merdeka

Maia Estianty lagi jadi perhatian banyak netizen. Hal tersebut karena utasnya yang mengundang banyak komentar.

Utas itu dibuat Maia Estianty dalam akun Threads miliknya. Foto: Instagram/@maiaestiantyreal

"Melihat burung liar makan, berpikir bahwa semua makhluk hidup rejeki nya ditanggung Allah itu benar, tapi burung juga kalau males terbang juga gak bakal dapet makanan... artinya kalau kita hidupnya kurang banyak uang, artinya kudu lebih ikhtiar lagi bekerja seperti burung yang terbang sana sini mencari makanan... kita males, ya rejeki kita seret, akan seret lagi kalo gak pernah bersedekah (dengan uang atau tenaga)," tulis Maia Estianty dalam Threads miliknya dilihat detikcom, Senin (12/10/2026). Foto: dok Threads Maia Estianty

Lantaran utasnya itu, ibu Al, El dan Dul itu menjadi perhatian netizen. Pro dan kontra menghampiri usai istri Irwan Mussry itu meng-

gah utas tersebut. Foto: dok Instagram maiaestiantyreal / bengurion. works

"Burung jg kesulitan terbang cari makan kalo hutan nya kebakaran smpe berbulan bulan.. Ngomong bgni sambil keliling desa Portugal mah gampang," jelas akun etrs****. "Mulai tone deaf," beber akun dgtre****. "Coba balik lg kemari pas udah jatuh miskin sampe buat menyambung hidup harus pake mikir antara sedekah dl atau isi perut sendiri dulu. Sampe situ dl aja ?? kalo masih keluar negeri pake PJ jgn bahas ini dulu. Ngga nyambung," terang akun lainnya. Foto: Instagram/@maiaestiantyreal. ● (dth)



ESDM Jabar Temukan 49 Tambang Ilegal di Cianjur, Hanya 9 Memiliki Izin

CIANJUR |
Harian Merdeka

Ditemukannya tambang ilegal atau biasa disebut galian C, di wilayah Cianjur selama periode tahun 2023 hingga 2026, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat, untuk wilayah Cianjur, Sebanyak 49 tambang ilegal tanpa izin.

Hal itu ditegaskan koordinator pertambangan dan air tanah ESDM Provinsi Jawa barat Diki Pramesti, Senin 12 Oktober 2026.

“Sedangkan di cianjur hanya ada 9 usaha pertambangan yang memiliki izin, dengan rincian 1 izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi, 6 IUP operasi produksi, dan 2 Surat Izin Panambangan Batuan (SIPB),” ucap Diki



Ia menambahkan, selain itu yang tanpa izin bukan ranahnya ESDM namun sektor lain, dan sudah dilakukan pemasangan spanduk termasuk menyampaikan surat peringatan pada

pengelola.

“Surat tersebut pun ditembuskan ke sejumlah pihak termasuk pada aparat penegak hukum (APH), seperti Polda Jawa Barat,” tambahnya.

Namun demikian tetap langsung ke lapangan, berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Satpol PP Kabupaten Cianjur, pemerintah kecamatan dan desa, hingga TNI-Polri.

Saat pengelola usaha yang diduga tambang ilegal tersebut tidak dapat menunjukkan izin usaha pertambangan (IUP), pihaknya pun langsung memasang spanduk bertuliskan ‘dilarang melakukan aktivitas penambangan tanpa dilengkapi izin’ di pintu masuk menuju tempat usaha.

“Itu sebabnya mengapa aktivitas pertambangan harus memiliki perizinan sesuai ketentuan seperti wilayah izin usaha pertambangan, izin eksplorasi hingga izin operasional,” pungkasnya.

● (Egi)

HUT ke-81 Jatim: Khofifah Serahkan Lencana Emas Kepada Menperin Sarmuji

SURABAYA |
Harian Merdeka

Menteri Perindustrian (Menperin) RI, Muhammad Sarmuji menerima penghargaan Lencana Jer Basuki Mawa Beya kategori emas dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim).

Penghargaan itu diberikan langsung oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa kepada Sarmuji dalam Upacara Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Graha di Surabaya. Penghargaan ini diberikan ke Sarmuji atas dedikasinya membangun Jatim.

Ditemui usai upacara, Sarmuji mengapresiasi kepemimpinan Khofifah bersama jajaran Pemprov Jatim dalam mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Perhatian yang diberikan oleh pemerintah provinsi ter-

hadap masyarakat Jawa Timur menjadi dorongan bagi berbagai pihak untuk terus memberikan kontribusi terbaik bagi daerah,” kata Sarmuji, Senin (12/10/2026).

Sekjen DPP Golkar ini juga mengapresiasi capaian pembangunan Jawa Timur yang dinilai menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan data yang disampaikan Khofifah, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur berada di atas rata-rata nasional dan menjadi yang tertinggi di Pulau Jawa.

Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan kerja keras pemerintah daerah dalam menjaga kinerja ekonomi sekaligus memperkuat fondasi pembangunan.

“Memasuki usia ke-81, Jawa Timur memiliki peluang besar untuk terus meningkatkan daya saing, terutama melalui pengembangan sektor industri. Potensi tersebut perlu disesuaikan



kan dengan karakteristik dan keunggulan masing-masing wilayah,” jelasnya.

Sarmuji menilai kawasan industri dapat menjadi salah satu pendorong percepatan industrialisasi di Jawa Timur. Namun, pengembangannya perlu ditopang infrastruktur yang mema-

dai, ketersediaan lahan, serta kesiapan pemerintah daerah.

“Dengan dukungan tersebut, kawasan industri diharapkan mampu menarik investasi, memperluas aktivitas ekonomi, dan membuka peluang pertumbuhan baru bagi daerah,” pungkasnya Sarmuji. ● (Egi)

LKPP Terima Aduan Dugaan Pelanggaran Mini Kompetisi Mebeler di Disdik Bekasi

KOTA BEKASI |
Harian Merdeka

Kejanggalan Pelaksanaan Mini Kompetisi (Mikom) katalog elektronik untuk pengadaan mebeler di Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi terus menuai sorotan tajam. Lembar dokumen pengadaan yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tersebut dipertanyakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Pusat.

Sorotan ini mencuat setelah adanya laporan konfirmasi resmi yang dilayangkan ke LKPP Pusat terkait dugaan maladministrasi dan pelanggaran aturan dalam proses lelang mebeler Disdik Kota Bekasi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, polemik ini bersumber dari kejanggalan dokumen spesifikasi teknis dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disusun oleh pihak PPK Disdik Kota Bekasi yang tidak sesuai implementasinya dilapangan. Dokumen tersebut dinilai menabrak aturan krusial serta pedoman resmi yang telah ditetapkan oleh LKPP.

Kasus ini semakin memanas setelah munculnya dugaan tindakan pengguguran sepihak terhadap beberapa penyedia jasa.



Langkah tersebut dinilai telah melanggar poin-poin krusial dalam dokumen pengadaan, di antaranya dugaan pelanggaran terhadap regulasi Perpres tentang pengadaan serta poin dokumen lelang resmi lainnya.

Mario dari LKPP mengungkapkan bahwa dalam perangkaan mini kompetisi sudah diatur dalam Keputusan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomer 93 Tahun 2025 tentang pelaksanaan E-purchasing katalog elektronik melalui metode mini kompetisi.

"terkait metode perangkaan Mikom sudah diatur dalam KepLKPP nomer 93 tahun 2025" Ungkap Mario saat menerima Audiensi pihak Media, Kamis 8

Oktober 2025 di Jakarta

Menurut Mario perangkaan dalam papan minikompetisi sudah diatur secara komprehensif dalam poin KepLKPP nomer 93 tahun 2025 secara runut papan peringkat kompetisi, mulai dari prioritas PDN dimana jumlah TKDN dan nilai BMP minimal 40%, kemudian Harga Terendah.

Setelah aplikasi Katalog Elektronik memberikan urutan prioritas pada papan peringkat kompetisi berdasarkan Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri selanjutnya akan dilakukan urutan prioritas berdasarkan harga penawaran terendah dari penawaran peserta kompetisi.

Harga terendah yang diberikan urutan prioritas pada papan

peringkat kompetisi dilakukan dengan ketentuan bahwa Aplikasi Katalog Elektronik akan memberikan prioritas urutan pada papan peringkat kompetisi berdasarkan harga penawaran penyedia dengan dua kriteria.

Pertama Harga Terendah Berdasarkan Harga Penawaran Penyedia Aplikasi Katalog Elektronik akan memberikan prioritas urutan pada papan peringkat kompetisi berdasarkan harga penawaran terendah jika total pagu tidak lebih dari 1 Miliar sedangkan jika pagu anggaran lebih dari 1 Miliar menggunakan metode Harga Terendah Berdasarkan Harga Evaluasi Akhir (HEA).

"Semua sudah diatur dalam peraturan LKPP cuma mungkin kami akan melakukan konfirmasi ulang terkait hal ini kepada UKPBJ dan PPK Disdik Kota Bekasi untuk melihat pelaksanaan dilapangan karena ada aduan" tambah Mario.

Hal senada juga diungkapkan oleh Essi dari Direktorat pasar Digital pengadaan LKPP saat membedah dokumen KAK Mikom Disdik Kota Bekasi pihaknya mengungkapkan akan melakukan pemanggilan pada para pihak terkait dilingkungan Disdik Kota Bekasi. ● (Egi)

Sengketa Lahan Summarecon, Ahli Waris Serahkan Dokumen Siteplan Bupati Bogor ke KPK



CIBINONG | Harian Merdeka

Kuasa hukum ahli waris Niko Mamesah, Martinus Siki, mengaku telah menyerahkan sejumlah dokumen terkait sengketa lahan Summarecon di

Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dokumen tersebut termasuk data penerbitan siteplan yang disebut diduga ditandatangani Bupati Bogor Rudy Susmanto.

Martinus berharap penyidik KPK menelusuri penerbitan siteplan tersebut dalam penyidikan kasus dugaan suap pengurusan dan pembukaan blokir Hak Guna Bangunan (HGB) proyek Summarecon. Menurut dia, dokumen itu berkaitan dengan lahan seluas 65 hektare yang masih menjadi objek sengketa

antara pihak ahli waris dan perusahaan pengembang.

"Semua data sudah saya serahkan ke KPK di Gedung Merah Putih, termasuk soal siteplan tersebut," imbuah Martinus.

Dia menyoroti sembilan siteplan dari total 12 bidang HGB Summarecon yang disebut telah ditandatangani Rudy Susmanto. Martinus mempertanyakan penerbitan dokumen tersebut karena status kepemilikan lahan masih dipersoalkan oleh pihak ahli waris.

Sengketa Lahan 65 Hektare

Martinus menjelaskan, sengketa bermula dari lahan seluas 65 hektare di Desa Nagrak, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, yang diklaim sebagai milik ahli waris Niko Mamesah dan keluarga.

Lahan tersebut merupakan bagian dari kawasan Summarecon seluas sekitar 500 hektare di sekitar Jalan Tol Jagorawi, Sentul, Bogor. Menurut Martinus, pihak ahli waris memiliki 12 Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan sejak 1972.

● (Egi)

Cegah Eksploitasi ABK, DPR Minta KKP dan Menaker Benahi Sistem Perekrutan

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Arif Rahman menyoroti sistem perekrutan anak buah kapal (ABK) menyusul kasus dugaan penganiayaan dan eksploitasi terhadap ABK KM Maulana 23. Ia menilai sistem perekrutan perlu diperketat untuk mencegah pekerja menjadi korban eksploitasi.

Kasus KM Maulana 23 mencuat setelah video dugaan penganiayaan terhadap ABK viral di media sosial. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kemudian mengamankan kapal beserta 28 awak kapal di perairan Laut Aru dan Arafura. Polisi mengidentifikasi empat ABK sebagai korban dan kini mendalami dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), termasuk menelusuri pihak yang berperan dalam proses perekrutan.

Arif mengatakan persoalan



tersebut tidak terlepas dari kondisi pekerja yang memiliki tingkat pendidikan relatif rendah sehingga rentan dibohongi oleh pihak yang menawarkan pekerjaan.

“Karena biasanya tenaga kerja kita ini kan karena memiliki latar belakang, mohon maaf, lebih ke tenaga kasar. Biasanya karena memang tingkat pendidikannya rendah.

Nah, dengan tingkat pendidikan rendah, jadi masyarakat ini bisa dibohongi. Terutama oleh calon-calon yang selama ini banyak merekrut kan, baik ke luar negeri maupun buat tenaga kerja di Indonesia,” ujar Arif saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Menurutnya, proses perekrutan juga kerap tidak disertai perjanjian kerja yang jelas. Kondisi itu, kata dia, dapat membuka celah terjadinya eksploitasi terhadap pekerja, termasuk ABK yang direkrut untuk bekerja di kapal penangkap ikan.

“Ini tidak dilakukan misalnya dengan perjanjian. Ini kan juga repot ya dengan iming-iming dia kerja di, misalkan kalau yang di nelayan ya pasti di kapal-kapal penangkap ikan atau yang seperti kejadian KM Maulana ini, ya jelas menurut saya ini merupakan sebuah eksploitasi dari individu, dari manusia,” tuturnya.

Arif menilai pembenahan sistem perekrutan tenaga kerja harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan. Ia juga menilai pembahasan RUU Perlindungan Tenaga Kerja menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan bagi pekerja, termasuk mereka yang bekerja di sektor perikanan.

● (Egi)

SKANDAL RP11 M PUPR LEBAK

Kondisi ini memicu kemarahan publik. Alih-alih memulihkan keuangan negara, pengembalian uang rakyat senilai Rp11 miliar tersebut justru mandek dan diduga menjadi ajang pembiaran terstruktur. Hingga kini, kas daerah dilaporkan baru menerima setoran “recek” sebesar Rp200 juta.

Sekretaris Jenderal Lembaga Swadaya Masyarakat MataHukum, Mukhsin Nasir, menilai Kejari Lebak gagal total menjalankan fungsi penegakan hukum pidana korupsi. Ia mendesak Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin, turun tangan mengevaluasi dan mencopot Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lebak jika tidak berani menyentuh para aktor utama di balik penguapan anggaran tersebut.

“Janji tinggal janji. Katanya bulan Mei diterbitkan Sprindik, tapi sampai hari ini penanganannya kasus ini justru melempem dan membisu. Kalau Kejari Lebak tidak mampu, penakut, atau ada indikasi ‘main mata’ dengan oknum pejabat dan pemborong,

kami minta Jaksa Agung tegas: copot Kajari Lebak! Jangan biarkan Korps Adhyaksa tercoreng oleh ketidakberanian menuntut kejahatan anggaran di daerah,” tegas Mukhsin Nasir dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (13/10/2026).

Modus Sistemik dan Dugaan Beli Waktu

Mukhsin menegaskan, temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Banten bukan sekadar persoalan administratif belaka. Kerugian negara Rp11 miliar akibat kekurangan volume fisik dan ketidaksesuaian spesifikasi pada proyek pembeutan serta pengaspalan jalan merupakan indikasi kuat tindak pidana korupsi yang terencana.

Ia mengkritik keras sikap Kejari Lebak yang terlalu mengandalkan pendekatan persuasif Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) yang terbukti tidak efektif.

“Pola ini diduga sengaja dipakai untuk mengulur waktu dan memberi ruang kompromi.

Bagaimana mungkin proyek belasan miliar bisa lolos verifikasi, dicairkan 100 persen, padahal pengawasannya bobrok? Ini melibatkan Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hingga Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Mengapa mereka belum diseret ke ruang penyidikan?” cecar Mukhsin.

Desak Pengeledahan dan Pemutusan “Siklus Kontraktor Hitam”

MataHukum menyinyalir, kegagalan menagih kerugian negara ini bertambah parah karena perusahaan-perusahaan atau rekanan bermasalah tersebut berpotensi masih menggelang bebas mendapatkan pengerjaan paket proyek baru pada APBD TA 2025 dan TA 2026 di Pemkab Lebak.

Oleh karena itu, MataHukum mendesak Kejaksaan Agung maupun Kejaksaan Tinggi Banten mengambil alih perkara ini apabila Kejari Lebak terus memperlihatkan sikap pasif.

“Hentikan lelucon kompromi

administratif ini! Kami mendesak Kejaksaan segera geledah kantor DPUPR Lebak, sita seluruh dokumen lelang dan dokumen pencairan, periksa semua pejabat terkait, dan seret para kontraktor nakal ke sel tahanan,” pungkas Mukhsin.

Salah satu warga Lebak inisial S membeberkan kekecewaannya “Penegakan hukum di Lebak kurang greget jarang sekali pengusutan kasus kasus korupsi selesai” ujar S

Guna memastikan tidak ada ruang gelap dalam penggunaan anggaran rakyat, MataHukum juga menerjunkan tim investigasi independen untuk membedah data realisasi pengadaan barang dan jasa Pemkab Lebak TA 2026.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Kejaksaan Negeri Lebak serta Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lebak belum memberikan respons resmi saat dikonfirmasi redaksi terkait mandeknya penanganan perkara tersebut.

● (Egi)

MENUNGGU MU KALAHKAN SIMEONE

JAKARTA |
Harian Merdeka

Atletico Madrid akan menjamu Manchester United di Liga Champions pekan ini. Diego Simeone mencatatkan rekor belum pernah tumbang saat berhadapan dengan Setan Merah.

Laga Atletico vs Man United berlangsung di Estadio Metropolitano, Rabu (14/10/2026) dini hari WIB. Los Colchoneros memburu kemenangan pertama mereka di Liga Champions musim ini.

Pada pertandingan pertama, Atletico menelan hasil buruk. Melawan Liverpool,

tim asal ibu kota Spanyol itu takluk dengan skor 1-2.

Atletico sejauh ini belum banyak berhadapan dengan Man United di bawah asuhan Simeone. Berdasarkan data Transfermarkt, Atletico baru dua kali bertemu dengan Setan Merah.

Hasilnya, Atletico mencatatkan satu kali kemenangan dan satu kali hasil imbang. Momen tersebut terjadi pada babak 16 besar Liga Champions 2021/2022.

Saat bertandang ke markas Man United, Atletico

menang dengan skor tipis 1-0. Pada 15 Maret 2022, Atletico mengunci kemenangan berkat gol tunggal Renan Lodi.

Sementara itu saat menjalani laga kandang, Atletico mencetak

gol cepat via Joao Felix pada menit ketujuh. Man United kemudian membalas lewat aksi Anthony Elanga.

Di sisi lain, Man United mempunyai modal kemenangan besar menjelang duel melawan Atletico. Pada matchday pertama Liga Champions, Bruno Fernandes dan kawan-kawan sukses memetik kemenangan telak 4-0 atas Sabah FC.

● (dts)



terbit setiap sore Senin s/d Sabtu

HARIAN **MERDEKA**

aspirasi rakyat

Langganan ePaper...

Dapatkan berita terkini setiap sore langsung di perangkatmu.

Hanya **Rp50.000/bulan** Hubungin **Alan Oskar : +62 895-2285-1963**

